

PENGEMBANGAN MODEL PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR

Gaspar Pera¹

¹Staff Sospol, Universitas Mulawarman, Indonesia.

Jalan Pasir Balengkong, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur,
Indonesia, 75119.

E-Mail:

ABSTRAK

Pengembangan Model Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Kalimantan Timur. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders-nya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau oprasionalnya. TJSL dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Terkait dengan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ada beberapa standar untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya adalah pedoman pengungkapan TJSL dengan Global Reporting Indeks dari *Global Reporting Initiatives* (GRI). Pedoman dari GRI ini banyak digunakan sebagai *benchmark* oleh para peneliti untuk mengukur kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui laporan ini, perusahaan menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu perlu melihat (1). Apakah perusahaan di Kalimantan Timur telah mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) yang sesuai dengan standar GRI? (2). Bagaimana model pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sesuai dengan kondisi di Kalimantan Timur?

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan TJSL, (2). Mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pengungkapan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (standar GRI) dan kondisi aktual (3). Memformulasikan alternatif-alternatif strategi dan pengembangan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Timur.

Penelitian mengambil *sample (purposive sampling)* di (1). PT Surya Hutani Jaya (pengusahaan hutan/Hutan Tanaman Industri) (2). PT Gunta Samba (perkebunan kelapa sawit) (3). PT Kaltim Prima Coal (pertambangan batubara). Penelitian bersifat eksploratif, dengan mengkombinasikan metode telaah dokumentasi (*documentation study*) dari berbagai sumber data sekunder dan metode langsung (*direct methods*) yaitu pengumpulan data primer dilapangan dengan teknik wawancara (*interview*) dan observasi lapangan (*field observation*).

Secara umum hasil studi menunjukan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh perusahaan besar berbasis lahan di Kalimantan Timur, khususnya tiga perusahaan yang menjadi kasus untuk diteliti, untuk PT. Surya Hutani Jaya/PT. SHJ(Hutan Tanaman Industri); 30,57% informan menyatakan perusahaan telah menjalankan TJSL, 59,06% informan menyatakan perusahaan tidak menjalankan TJSL dan 10,36% informan menyatakan tidak tahu.

PT. Gunta Samba/PT. GS (Perkebunan Kelapa Sawit); 27,20% informan menyatakan perusahaan telah menjalankan TJSL, 41,68% informan menyatakan perusahaan tidak menjalankan TJSL dan 31,17% informan menyatakan tidak tahu, Dan PT. Kaltim Prima Coal/PT. KPC (Pertambangan Batubara); 44,80% informan menyatakan perusahaan telah menjalankan TJSL. 44,20% informan menyatakan perusahaan tidak menjalankan TJSL dan 11,00% informan menyatakan tidak tahu.

Ketiga perusahaan tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan kriteria Global Reporting Initiative (GRI). Demikian halnya Model Umum Pengembangan Program TJSL yang terdiri dari : Input; Diagnosis dan Disain; Referensi; Rasionalisasi dan Implementasi. Maka dapat diusulkan 3 (tiga) model pengembangan TJSL yaitu: (1) Model TJSL berbasis input dari Bawah (*Bottom-Up Model*) ; (2) Model TJSL berbasis input dari Atas (*Top-Down Model*) ; serta Model Dua Arah (*Bilateral-Matching Model*).

Dengan demikian hendaknya pemerintah dari tingkat pusat, propinsi terlebih tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur lebih serius untuk mengatur dan mengendalikan program TJSL terutama bagi industri berbasis lahan. Hal ini dikarenakan menyangkut hajat hidup dan masa depan orang banyak, terutama masyarakat kecil yang hidup di/dari dan pada sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh para investor skala besar; Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, perlu mempertimbangkan bahwa TJSL adalah bagian integral dari proses pembangunan Nasional/Daerah.

Kata kunci : pengembangan model, tanggun jawab sosial, lingkungan

ABSTRACT

Model Development Program Social Responsibility and Corporate Environment Forestry, Plantation and mining in East Kalimantan. Social and Environmental Responsibility (TJSL) which can be defined as a Vendor moral responsibility towards their stakeholders, particularly the community around the work area or oprasionality. TJSL can be understood as an attempt commitment to act ethically, operating legally and contribute to economic improvement along with improved quality of life of employees and their families, the local community and the wider community. Related to the disclosure of Social Responsibility and Environment there are some standards to measure the disclosure of social and environmental responsibility, one of which is TJSL disclosure guidelines by the Global Reporting Index of Global Reporting Initiatives (GRI). The guidelines of the GRI is widely used as a benchmark by the researchers to measure the disclosure policy of corporate social responsibility. Through this report, companies demonstrate accountability and transparency in the implementation of social and environmental responsibility. Therefore it is necessary to see (1). Is the company in East Kalimantan has implemented a Social and Environmental Responsibility (TJSL) in accordance with the GRI standards? (2). How to model the development of Social and Environmental Responsibility (TJSL) in accordance with the conditions in East Kalimantan? The purpose of this study are: (1). Identify the activities TJSL, (2). Know and analyze the fit between the disclosure of the implementation of the Social and Environmental Responsibility (GRI standards) and actual conditions (3). Formulating alternatives and developing implementation strategies Social and Environmental Responsibility in accordance with the conditions of East Kalimantan.

Research taking samples (purposive sampling) in (1). PT Surya Hutani Jaya (concession / Industrial Plantation Forest) (2). PT Gunta Samba (oil palm) (3). PT Kaltim Prima Coal (coal mining). Explorative study, by combining methods of study documentation (study documentation) from various secondary data sources and methods directly (direct methods), namely in the field of primary data collection by interview (interview) and observation (field observation).

In general, the study results showed that the Program of Social and Environmental Responsibility (TJSL) basically implemented by all major land-based company in East Kalimantan, particularly the three companies were to be the case to be investigated, to PT. Hutani Surya Jaya / PT. SHJ (Industrial Plantation Forest); 30.57% of the informants said the company has been run TJSL, 59.06% of the informants said the company does not run TJSL and 10.36% of informants claimed not to know.

PT. Gunta Samba / PT. GS (Palm Oil); 27.20% of the informants said the company has been run TJSL, 41.68% of the informants said the company does not run TJSL and 31.17% of informants claimed not to know, And PT. Kaltim Prima Coal / PT. KPC (coal mining); 44.80% of the informants said the company has been run TJSL. 44.20% of informants stated the company does not run TJSL and 11.00% of informants claimed not to know.

All three companies are not fully utilizing the criteria Global Reporting Initiative (GRI). Similarly, the General Model Development TJSL program consisting of: Input; Diagnosis and Design; Reference; Rationalization and implementation. It can be proposed three (3) models TJSL development, namely: (1) Model-based TJSL input from Down (Bottom-Up Model); (2) Model-based TJSL input from the Top (Top-Down Model); and Model Two-Way (Bilateral-Matching Model).

Thus the government should be of national, provincial first district / city in East Kalimantan is more serious to regulate and control the TJSL program especially for land-based industries. This is because regarding hajat life and future of the people, especially the smaller communities that live in / on and on natural resources exploited by large-scale investors; the Government, in particular the Government of East Kalimantan, it is necessary to consider that TJSL is an integral part of the process National development / Local.

Key words : model development, social responsibility, environment

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, sebagian besar hutannya adalah hutan hujan tropis (*tropical rain forests*) yang tidak saja menyimpan kekayaan hayati flora yang beranekaragam, tetapi juga termasuk ekosistem terkaya dan sekaligus terluas di dunia. Luas hutan hujan tropisnya diperkirakan lebih dari 1.148.400 km² atau tidak kurang dari 114,0 juta hektar dan menyimpan diantaranya 447 spesies palm, lebih dari 400 spesies dipterocarps; jenis tumbuhan kayu komersial yang paling berharga), 25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% tumbuhan berbunga di dunia, 16% spesies reptil dan ampibi, 17% spesies burung dan 25% spesies ikan serta masih banyak jenis lainnya. Disamping jenis flora dan fauna, maka habitatnya juga sangat beragam, sehingga dikenal sebagai “*Center of World Mega-Biodiversity*” (Richards, 1952; Whitmore, 1975; BAPPENAS, 2003^{a,b}).

Disamping sumber daya hutan, Indonesia juga dikenal memiliki kekayaan sumberdaya alam terbarui (*renewable resources*) lainnya seperti perikanan dan pertanian, maupun sumber daya alam tidak terbarui (*non-renewable* atau *deposit resources*) a.l. minyak, gas bumi dan mineral lainnya, yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Limpahan sumber daya alam yang tersedia terus menerus (*flow resources*) sebagai contoh sinar matahari. Meskipun demikian pemanfaatannya sebagai modal pembangunan seringkali mendapatkan kritikan, dikarenakan tidak mengarah pada penghematan maupun kelestariannya, bahkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan bagi lingkungan alam dan lingkungan sosial (Soemarwoto, 1985; Soerjani, dkk., 1987; Ascher, 1999; FWI/GFW, 2001).

Demikian juga halnya dengan Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi dengan luas wilayah 129.066,44 km² (setelah terpisahnya Kalimantan Utara/Kaltara pada tahun 2014 yang lalu) luas daratan 127.267,52 km² terletak antara 113°44’ dan 119°00’ bujur timur, dan antara 2°25’ lintang utara dan 2°25’ lintang selatan. Provinsi ini memiliki kekayaan sumberdaya alam terbarui dan tidak terbarui, dalam arti potensi, luas dan keragamannya. Sebagaimana provinsi di Kalimantan lainnya, kekayaan ini selain menjadi menjadi ruang kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya secara turun temurun (Mubyarto, dkk., 1991; 1992; Sardjono, 2004^a), sejak awal kebangunan ekonomi luar Jawa pada dasawarsa tahun 70-an juga menjadi andalan modal pembangunan Nasional dan daerah (Boer, dkk., 2004).

Pemanfaatan sumber daya alam di Kaltim (dan juga di daerah luar Jawa lainnya) menggunakan sistem konsesi atau perizinan dalam bentuk izin usaha pemanfaatan, perusahaan maupun penggunaan kawasan, yang secara umum sejak awalnya dipercayakan kepada para investor skala besar. Meskipun industrialisasi sudah dimulai sejak lebih dari empat dasawarsa yang lalu, tetapi berdasarkan kenyataan keluarnya izin pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam khususnya perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan pemanfaatan hasil hutan meningkat tajam sejak pemberlakuan kebijakan otonomi daerah (otda) di awal tahun 2001 yang lalu. Menurut catatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber (a.l. Sardjono, dkk., 2012; Hamzah dan Rosdiana, 2014; Sardjono, 2014), untuk sektor berbasis lahan yang pertama, pertambangan batubara hingga awal tahun 2014 telah mencapai 5,2 juta hektar. Total jumlah ijin Pertambangan batubara mencapai

1.419 yang terdiri atas 1.386 izin usaha pertambangan (IUP) dan 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Total produksi 204,99 juta ton (2011) dengan cadangan produksi 8,184 Milyar ton. Jumlah produksi yang demikian besar mendatangkan *Royalty* dan iuran tetap batubara bagi Kaltim paling tidak untuk 2011 berjumlah Rp. 4,56 Triliun. Sementara untuk perkebunan kelapa sawit (hanya hingga pertengahan 2012) terdapat 278 buah perusahaan kelapa sawit tersebar di 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim (tanpa Kaltara) dengan luas izin keseluruhan sekitar 3,03 juta hektar. Berbeda dengan pertambangan batubara, perkebunan secara umum berada di luar kawasan hutan (meskipun ada juga sebagian izin yang terlanjur diterbitkan dalam kawasan). Adapun di sektor kehutanan, dari dengan luas total kawasan 8,35 juta, maka 4,54 juta hektar telah dibebani dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan masih sekitar 1,04 juta hektar IUPHHK-Hutan Tanaman. Berarti total telah sekitar 66% kawasan hutan (khususnya Hutan Produksi) telah dibebani sekitar 90-an pemegang hak pemanfaatan kayu skala besar, dan hanya menyisakan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi yang praktis diutamakan fungsi perlindungannya.

Kehadiran pengusaha sumber daya alam skala besar memang telah mengurangi ruang gerak dan bahkan sumber penghidupan masyarakat setempat (*local community*), yang dalam istilah Soetrisno (1993) disebut '*lebensraum*'. Bahkan menurut Sardjono (2004^a), kondisi kehadiran perusahaan di bidang perkayuan justru menimbulkan subsidi ekonomi yang terbalik (*trickle-up effects*), dimana masyarakat lokal yang kehidupannya tergantung dari hutan, justru harus mengorbankan ruang

hidupnya. Kondisi yang ada tidaklah berlebihan karena jika merujuk data luasan penguasaan kawasan yang disampaikan terdahulu, dimana hanya untuk tiga kegiatan berbasis lahan, perkayuan, pertambangan batu bara dan kelapa sawit, praktis perizinannya hampir menghabiskan sebagian besar wilayah administratif daratan Kaltim, meskipun dalam prakteknya hanya yang telah berproduksi saja yang benar menggunakan kawasannya.

Secara teoritis sosiologis kompetisi atau persaingan atas sumberdaya alam antara masyarakat setempat dan para pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam, merupakan interaksi yang bersifat dissosiatif, dalam arti negatif dan/atau saling merugikan (Polak, 1966; Soekanto, 1990). Jika proses ini dibiarkan terus berlangsung dalam taraf lanjut akan menjurus pada kontraversi dan konflik. Keterbatasan atau semakin langkanya ketersediaan sumber daya alam yang ada di tengah peningkatan populasi penduduk beserta kebutuhannya merupakan pemicunya. Kejadian konflik atas sumber daya alam terutama di bidang kehutanan sebenarnya telah tercermin di awal masa reformasi 1998 hingga transisi menuju otda yang diawali tahun 2001 (Sardjono, 2004^a; Wulan, dkk., 2004).

Sementara konflik di bidang perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara baru dirasakan khususnya setelah implementasi otda (a.l. Sumardo, dkk., 2011; Marino, dkk., 2013). Menurut Marino, dkk. (2013), Pulau Kalimantan saja, tahun 2012 menunjukkan bahwa telah terjadi 108 konflik di sektor perkebunan, 28 konflik di bidang kehutanan, dan 13 konflik di sektor pertambangan. Konflik secara umum terjadi dikarenakan tumpang tindih lahan usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Atas dasar itulah, perlu ada pengalihan pada interaksi, dari yang bersifat dissosiatif menuju yang bersifat asosiatif atau yang saling menguntungkan, antara lain dalam bentuk kerjasama melalui program pendekatan sosial-ekonomi dan ekologi (Sardjono, 2004^b). Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan implementasi Program TJSL.

2. METODA PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Lokasi yang dipilih untuk penelitian pengembangan model TJSL ini adalah PT Surya Hutani Jaya (HTI) yang berlokasi di Kecamatan Sebulu, kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dan kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, PT Gunta Samba (perkebunan kelapa sawit) berlokasi di Desa Karang Kecamatan Kaibun dan di Desa Mio Baru Kecamatan Kong Beng Kabupaten Kutai Timur, serta PT Kaltim Prima Coal (pertambangan batubara) yang berlokasi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sangata Utara, Kecamatan Rantau Pulung, dan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Pada Bulan Juni-Maret 2014.

2.2. Bahan dan Peralatan

Sebagai penelitian kualitatif secara umum bahan utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah berupa produk cetak, disamping sejumlah literatur, hasil-hasil penelitian, publikasi berupa jurnal, data dari instansi pemerintah dan lain sebagainya juga kebijakan, peraturan-

perundangan yang berkaitan dengan TJSL.

Adapun alat/perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kuisioner (baik untuk perusahaan masing-masing, pemerintah dan masyarakat). Kamera atau tustel (mengambil obyek yang dibutuhkan). Handphone (yang dapat merekam wawancara). Laptop yang dilengkapi dengan perangkat lunak *statistical analisis system* (SAS) versi 6.4, *statistical process for social science* (SPSS) serta koneksi internet.

2.3. Prosedur Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan TJSL, menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan standar acuan GRI,
2. Setiap item acuan GRI diberi bobot angka 1 untuk jawaban “Ya” dan angka 0 untuk jawaban “Tidak” agar dapat menjembatani data kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat diolah secara statistic.
3. Menyiapkan, mendapatkan laporan tahunan, laporan keuangan (neraca rugi laba) dari masing-masing perusahaan yang diteliti (PT Surya Hutani Jaya, PT Gunta Samba dan PT Kaltim Prima Coal).
4. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data primer yang diperoleh dan membandingkan dengan acuan standar GRI dalam hal ini bertujuan untuk menghindari subyektivitas laporan tahunan sehingga lebih objektif.

5. Memperlihatkan secara visual hasil- hasil yang telah dicapai oleh masing-masing perusahaan agar menjadi semacam bahan perbandingan.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengkombinasikan beberapa teknik pengumpulan data dan informasi, yaitu :

1. Wawancara.

Wawancara merupakan alat untuk pengumpulan data (data collection) dan sekaligus *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.

Peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* dalam pengambilan sampel yaitu sampel informan (responden) ditentukan secara langsung, dan jumlah sampel responden sebanyak 153 orang.

2. Observasi.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dalam penelitian ini adalah ruang (tempat) waktu, pelaku, kegiatan, obyek dan perbuatan, kejadian atau peristiwa. Adapun alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik, perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu (misal perekonomian

keluarga), melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (jika diperoleh dari jawaban informan).

3. Studi Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan/rekaman proses, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam (meskipun dalam penelitian ini dibatasi pada masa operasi perusahaan). Sebagai sumber dokumen tidak terbatas yang bersifat cetakan (*hard-copy*) milik institusi pemerintah atau swasta, akan tetapi juga data di server dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.

Dalam penelitian ini dokumen yang sangat dibutuhkan dari perusahaan yang diteliti seperti laporan tahunan, laporan keuangan termasuk laporan rugi laba, dokumen dari instansi pemerintah misalnya dari dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas pertambangan, badan pusat statistic dan instansi lain yang berhubungan dengan TJSL perusahaan.

2.5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mendasarkan diri pada pola berfikir induktif. Pada pola berfikir induktif, didasarkan pada sejumlah fakta-fakta empiris yang terdapat dilapangan dikonstruksikan menjadi serangkaian pola atau proses tertentu yang bersifat lebih spesifik dan khas melalui metode pemahaman serta proses interpretasi. Oleh karena itu, pada umumnya analisis kualitatif ditunjukkan untuk membangun atau pembentuk konsep-konsep atau teori-teori baru (Newman, 2003).

Untuk mencapai tujuan tersebut analisis data pada pendekatan kualitatif

dimulai dengan melakukan *coding*. *Coding* dilakukan dengan mengorganisasikan data-data mentah kedalam kategori-kategori konseptual dan menciptakan tema-tema atau konsep-konsep yang kemudian digunakan untuk analisis data. Aktivitas *coding* dilakukan dengan dua data secara simultan, yaitu mengkategorikan data-data secara analitik kedalam tema-tema tertentu sekaligus melakukan penyederhanaan-penyederhanaan data (Newman, 2003).

Terdapat tiga tahapan *coding* data kualitatif. Yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Pada tahap *open coding*, yaitu peneliti menempatkan tema-tema dan memberikan kode awal atau label sebagai usaha awal untuk mendapatkan data yang sangat luas menjadi kategori-kategori. Setelah melakukan *open coding* peneliti melakukan *axial coding*. Pada *axial coding* peneliti mulai mengidentifikasi dasar atau akar dari konsep kunci dalam analisis. Selama proses ini, peneliti mulai mempertanyakan mengenai sebab dan konsekuensinya, kondisi-kondisi interaksi, strategi dan proses serta melihat kategori atau konsep yang dapat dikelompokkan. *Axial coding* menstimulasi pemikiran mengenai hubungan antara konsep-konsep dan tema-tema dengan bukti-bukti empiris. Setelah itu, tahap *axial coding* peneliti kemudian memasuki tahap *selective coding* pada tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi tema-tema utama, dengan melihat secara selektif kasus-kasus yang mengilustrasikan tema-tema dan membuat perbandingan serta kontras-kontras setelah semua data terkumpul dengan lengkap. Hal ini dimulai setelah sebelumnya diperoleh konsep-konsep yang telah terbangun dengan baik dan mulai mengorganisasikan analisis keseluruhan (Noviatry, 2004).

Dapat kita membuat langkah-langkah analisis data dalam studi kasus sebagai berikut:

1. Mengorganisir informasi/data yang diperoleh.
2. Membaca keseluruhan informasi/data dan membuat kode.
3. Mencari, mendapatkan laporan tahunan, laporan keuangan (rugi-laba).
4. Membandingkan dengan standar acuan GRI (berapa banyak item di implementasi).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Program TJSL PT Surya Hutani Jaya

Pada dasarnya perusahaan PT. Surya Hutani Jaya (SHJ) tidak memiliki program TJSL secara khusus di internal perusahaannya. Kendati demikian ada departemen tanggung jawab sosial di PT SHJ dengan tujuan utama mengantisipasi semua permintaan masyarakat disekitarnya. Umumnya yang diminta warga misalnya:

1. Penyediaan alat berat seperti traktor, dozer dan sebagainya untuk pembuatan dan perbaikan jalan;.
2. Penyediaan beasiswa bagi anak-anak yang orang tuannya kurang mampu dan berdiam disekitar perusahaan. Hanya saja sangat disayangkan sudah berapa anak dan berapa besar jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk beasiswa masih dirahasiakan perusahaan;
3. Pemberian bantuan insentif bagi guru honor, desa didukung dengan tiga orang guru honor, dan setiap orang guru diberikan honor sebesar Rp.250.000/bulan; untuk setiap desa.
4. Pemberian bantuan insentif bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Dewan Perwakilan Desa,

masing-masing sebesar Rp. 250.000/bulan. Insentif ini berlaku untuk semua desa disekitar perusahaan; Disamping itu

5. Membantu Kecamatan (misalnya pernah membantu untuk perlombaan MTQ di kecamatan Sebulu).

Program TJSL perusahaan SHJ disusun dan dievaluasi setiap tahun. Program untuk tahun 2015 pada saat penelitian ini berlangsung sedang disusun dan belum mendapat persetujuan dari pihak management perusahaan.

3.2. Program TJSL PT Gunta Samba

Pada dasarnya sebagaimana pada PT. SHJ perusahaan ini tidak memiliki program tanggung jawab sosial secara khusus di internal PT. Gunta Samba (GS). Meskipun demikian, seperti halnya PT. SHJ, ada departemen tanggung jawab sosial di PT GS dengan tujuan utama mengantisipasi semua permintaan masyarakat disekitarnya. Permintaan masyarakat yang dipenuhi PT GS selama ini antara lain :

1. Minyak (solar) 300 liter/bulan;
2. Tiga orang guru honorer TK Bunda dengan insentif masing-masing guru sebesar Rp.300.000,00/bulan;
3. Tanah 1^{1/2}ha dari program transmigrasi dan 1 ha sebagai plasma dari perusahaan, mulai dari tahun 2007 dihargai Rp. 75.000,00, dan tahun 2012 Rp.114.000,00 perbulan, dan tahun 2014 naik menjadi Rp. 250.000,00 /ha/bulan .
4. Penyediaan alat berat seperti traktor, doser dan sebagainya untuk pembuatan dan perbaikan jalan;
5. Pemberian bantuan insentif bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa masing-masing Rp.300.000/bulan, untuk semua desa disekitar perusahaan;
6. Penyediaan plasma untuk masyarakat, hingga saat ini sudah terbangun sebanyak 1.850 ha;

7. Rumah layak huni via Pemeritah Kabupaten, yang jadi 9 buah (termasuk dari perusahaan lainnya), dengan nilai pagu Rumah Layak Huni Rp.50.000.000,00/buah;

8. Guna menanggulangi bahaya longsor melakukan penanaman sepadan sungai dengan Kelapa Sawit (Sungai Galang, Galang, Kadungan)

Perlu ditambahkan dari total luas desa 2.823 ha, maka yang dikelola PT GS untuk pengembangan Plasma seluas 720 ha. Disamping itu masuk dalam plasma juga tanah awal dari transmigrasi 1^{1/2}ha per-Kepala Keluarga (KK). Jadi sekarang setiap peserta program Plasma rata-rata memiliki 2^{1/2}ha kebun sawit,mampu menghasilkan keuntungan Rp.625.000,00 per bulan, dikurangi transfer via koperasi Gunung Mas Rp.10.000,00 per ha, masih ada keuntungan peserta plasma Rp.615.000,00/ha/bulan

3.3. Program TJSL PT KPC

Berbeda dengan dua perusahaan sebelumnya, maka program TJSL di PT. Kaltim Prima Coal (KPC) lebih terarah melalui perencanaan yang lebih lengkap substansinya. Dalam perencanaan program tertuang juga Visi program TJSL, yaitu 'Produsen batubara terkemuka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia, yang memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan'. Visi ini selanjutnya dilengkapi dengan Misi TJSL, yaitu:.

1. Memupuk budaya yang mengutamakan kesehatan, keselamatan dan lingkungan dalam segala tindakan, dengan:
 - a. Mematuhi peraturan perundangan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang berlaku;
 - b. Berupaya tanpa henti mempromosikan budaya praktik

- terbaik dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan dan lingkungan;
2. Memelihara tatakelola perusahaan yang baik dan mempromosikan perusahaan sebagai warga yang baik, meliputi:
 - a. Mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, tanggung-gugat, tanggung-jawab, integritas dan keadilan;
 - b. Peka terhadap falsafah bangsa dalam kehidupan sehari-hari;
 3. Menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulan dan meningkatkan kesejahteraan, melalui kegiatan:
 - a. Mendorong pemberdayaan karyawan;
 - b. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja yang unggul;
 - c. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan dinamis;
 4. Mengoptimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan, dengan cara:
 - a. Memaksimalkan pengembalian investasi pemegang saham;
 - b. Memastikan para mitra diakui dan didorong memberikan pencapaian lebih tinggi;
 - c. Mendorong terciptanya rasa memiliki, semangat kemitraan dan dukungan masyarakat terhadap operasi KPC;
 - d. Menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan risiko para pemangku kepentingan;
 5. Menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasi terbaik untuk menghasilkan produk dan kinerja berkualitas konsisten, melalui:
 - a. Terus-menerus berupaya menjadi produsen batubara yang efisien;
 - b. Meminimalkan kerugian;
 - c. Memupuk budaya perbaikan berkesinambungan.

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dilengkapi dengan 7 (tujuh) Nilai yang dianut, yaitu: Keunggulan; Integritas; Transparansi; Kegesitan; Pemberdayaan; Kerjasama; dan Kepedulian. Mengacu pada skenario TJSL dan Rencana Paska Tambang KPC yang telah disetujui Pemerintah pada tahun 2011, KPC telah melakukan berbagai uji coba di bidang pertanian di lahan paska tambang dan secara khusus telah memanfaatkan lahan paska tambang sebagai Percontohan Peternakan Sapi yang telah dimulai sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dalam pendampingannya KPC terus mendorong masyarakat untuk terus dapat memaksimalkan semua potensi lokal yang dimilikinya, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap berbagai sarana produksi pertanian dari luar daerah, sekaligus meningkatkan produktifitas masyarakat dan desa.

Berikut sejumlah kegiatan pengembangan agribisnis, dimana dalam pelaksanaannya KPC terus mencoba mengoptimalkan keterkaitan dan keterpaduan berbagai sektor untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan mendorong keberlanjutannya.

1. Peternakan Sapi Terpadu (PESAT)

Program pemanfaatan lahan paska tambang yang dilakukan sejak tahun 2009 ini sudah memasuki masa produksi, walaupun masih dalam tahapan uji coba. Produksi yang dihasilkan antara lain susu segar dan olahan serta penggemukan sapi dalam skala kecil. Selain kegiatan percontohan untuk produksi, kegiatan utama berupa peningkatan kapasitas masyarakat khususnya di bidang peternakan juga menjadi bagian utama kegiatan di PESAT, baik berupa pelatihan secara khusus, penelitian maupun kunjungan dalam rangka pengenalan yg

dilakukan oleh lembaga pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi.

Tercatat kurang lebih 3600 orang yg berkunjung ke PESAT di tahun 2013, dengan berbagai agenda. Sebanyak 2941 (81%) dari lembaga pendidikan, 424 (13%) tamu perusahaan dari berbagai institusi dan 229 orang (6%) peternak. Semua kegiatan di PESAT diproyeksikan untuk dapat memberikan manfaat baik secara pengetahuan dan ketrampilan namun juga secara ekonomi. Jaringan dalam memenuhi kebutuhan berbagai pakan terus dibangun, agar ketergantungan terhadap pakan dari luar daerah dapat dikurangi. Produk yang berbahan baku susu juga sudah mulai dilakukan dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan produk susu segar di tahun 2014.

Selain kegiatan yang berkaitan langsung dengan ternak, tersedia juga paket kunjungan yang dikelola oleh kelompok pemuda dampingan berupa studi lapangan pengenalan peternakan ditambah dengan permainan dan pemberian hadiah berupa produk susu olahan dan lain lain. Kegiatan peningkatan kapasitas baik berupa pelatihan dan penelitian dilakukan bekerjasama dengan antara lain Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur, Universitas Mulawarman, Universitas Brawijaya, Institute Pertanian Bogor, SMK Sangkulirang, Peternak Sapi Bukit Pelangi, PT YSB. PESAT terus membenahi diri dengan melengkapi berbagai fasilitas serta memperluas jaringannya, agar keberadaan PESAT dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Prima Agri

Prima Agri yang dibangun KPC pada tahun 2010 diatas areal seluas 4 ha di desa Kebon Agung SP7 di Kecamatan Rantau Pulung digunakan sebagai kantor

perwakilan *Community Empowerment* PT KPC dan juga media fasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian skenario TJSL menuju pencapaian desa mandiri yang merupakan bagian dari rencana penutupan tambang. Prima Agri terus konsisten dalam menjalankan misinya dan fungsinya yaitu fungsi informasi komunikasi, pendidikan dan pelatihan, produksi dan juga pemberdayaan

Selama tahun 2013, sejumlah 324 pengunjung datang ke Prima Agri yang berasal dari berbagai kalangan dengan maksud dan tujuan yang beragam. Siswa, masyarakat, mahasiswa, pemerintah, swasta, perbankan berkunjung untuk mendapatkan informasi, edukasi, bertukar pengalaman atau sekedar wisata agro.

Kegiatan yang dilakukan oleh Prima Agro selama tahun 2013 berkaitan dengan berbagai fungsi yang dijalankannya, yaitu:

- a. Fungsi Informasi dan Komunikasi - Sosialisasi program PERGIZI, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, beasiswa, bulan bakti gotong royong, MTQ. Koordinasi dan komunikasi terkait berbagai program KPC dan kegiatan desa juga dilakukan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- b. Fungsi Pendidikan – Memfasilitasi perkemahan siswa SMP Rantau Pulung, kunjungan siswa SMU Rantau Pulung, SPP-SPMA Samarinda, mahasiswa STIPER Kutai Timur, UPTD Pendidikan Rantau Pulung, BPTP Propinsi Kalimantan Timur dan juga lembaga Swadaya Masyarakat.
- c. Fungsi Pelatihan – Memfasilitasi berbagai pelatihan, antara lain: pelatihan perawatan kebun jeruk dan buah naga, pelatihan membuat pestisida nabati dan MOL oleh Dosen UNMUL, penyuluhan perbanyak buah naga, pelatihan budidaya jamur,

- pelatihan administrasi untuk staffdesa dari pemerintah kecamatan.
- d. Fungsi Produksi - Dari berbagai budidaya yang dilakukan di lahan seluas kurang lebih 4,0 ha, produksi yang dihasilkan selama tahun 2013 antara lain 247 Kg buah Naga, 469 nanas dan kurang lebih 1000 bibit buah naga.
 - e. Fungsi Pemberdayaan - sebagai fungsi pemberdayaan Prima Agri turut berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian yang antara lain:
 - 1) Agribisnis Jeruk - Luasan tanaman jeruk yang masih dibudidayakan masyarakat sampai saat ini masih ada sekitar 81,0 ha tersebar di 9 Desa di Kecamatan Rantau Pulung dan Bengalon. Penurunan hingga 75% dari luasan yang tertanam karena usia tanaman yang sudah tua, alih fungsi lahan ke perkebunan sawit, mati terserang hama dan penyakit serta mati karena kebakaran kebun. Untuk varietas jeruk keprok borneo prima sudah mulai berproduksi. Pemasaran berjalan normal dengan tata niaga yang sudah terbangun ditingkat petani;
 - 2) Agribisnis Kakao - Tanaman kakao seluas 70,0 ha pada tahun 2011, ternyata tidak bisa dipertahankan, karena banyak yang dialihfungsikan untuk perkebunan sawit ditambah dengan serangan hama penggerek buah kakao yang hebat serta penyakit VSD yang tak dapat dikendalikan oleh petani.
 - 3) Agribisnis Durian – Kurang lebih 2000 pohon durian yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Rantau Pulung dengan luasan sekitar 25,0 ha masih terawat dengan baik.

Produksi rata-rata 100kg/pohon dengan bobot perbuah antara 4-5 kg. Tata niaga berjalan normal dengan harga Rp35.000 – 40.000/kg.

- 4) Budidaya padi berbasis SRI - Uji coba budidaya padi berbasis SRI dilakukan pada akhir tahun 2011 di Rantau Pulung dan Bengalon. Uji coba ini memberikan berdampak positif terhadap perubahan model budidaya padi yang selama ini petani lakukan karena terbukti dapat meningkatkan produktifitas secara signifikan. Adopsi teknologi ini diterapkan oleh petani dari berbagai wilayah dengan luasan mencapai 50,0 ha. Peningkatan produksi mencapai 100% sementara terjadi penurunan biaya produksi sampai dengan 40%.

3. Pengembangan Budidaya Tanaman Semusim

Budidaya tanaman semusim adalah budidaya tanaman yang panen sebelum satu tahun. Tanaman ini meliputi tanaman jagung, singkong, padi, sayur-sayuran, dan lainnya. Hingga akhir tahun 2013, terdapat 24 kelompok tani yang mengembangkan tanaman semusim di Bengalon. Kegiatan pengembangan tanaman semusim ini mampu menyerap tenaga kerja non-skill, serta mendorong kecamatan Bengalon menjadi daerah yang mampu mencapai swasembada sayuran. Beberapa desa telah mampu menjadi penghasil sayuran seperti Sepaso Selatan, Sepaso Barat, dan Sepaso Induk. Khususnya untuk Sepaso Barat, saat ini telah menjadi penghasil semangka terbesar di Bengalon. Pengembangan padi sawah masih terus digalakkan di

Sepaso Selatan tahun ini untuk meningkatkan ketahanan pangan di Bengalon. Peningkatan produksi dilakukan dengan menerapkan metode SRI, dengan metode ini peningkatan produksi mencapai peningkatan 100% atau sekitar 7 ton/ha dibandingkan dengan metode konvensional. KPC juga menggandeng STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) Sangatta dalam implementasi program ini. Selain itu, KPC juga mengembangkan kerjasama dengan kontraktor lokal, PPL pertanian tanaman pangan dan pemerintahan desa dalam pengembangan program ini. Keterlibatan lintas pemangku kepentingan ini diharapkan akan mampu mewujudkan Desa Sepaso Selatan sebagai desa yang mandiri pangan.

4. Pengembangan Tanaman Tahunan

Tanaman tahunan adalah tanaman yang masa produksinya setelah umur

Tabel 1. Perkembangan Kegiatan Tanaman Tahunan dalam rangka TJSL di PT. KPC

No	Kegiatan	Waktu							Satuan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Kakao	50	30	15	15	15	15	15	Hektare
2.	Durian	20	15	15	15	15	16	16	Hektare
3.	Jeruk	7	3	5	5	5	5	5	Hektare
4.	Jumlah kelompok	5	3	5	5	5	5	7	Hektare
5.	Jumlah anggota	50	39	40	40	40	40	50	Orang
6.	Jumlah desa yang terlibat	2	3	3	3	3	3	4	Desa

Sumber: PT. KPC (2014)

5. Pengembangan Perikanan Pesisir Pantai dan Nelayan

Usaha tambak merupakan kegiatan ekonomi yang paling sering dijumpai pada pesisir pantai. Usaha pengembangan perikanan pesisir pantai/tambak berjalan

tanaman lebih dari setahun. Walaupun beberapa komoditi mengalami pasang surut namun beberapa komoditas perkebunan baru berkembang di Bengalon. Oleh karena itu, KPC memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan tanaman tahunan ini dengan memberikan bantuan bibit kakao, durian, dan jeruk serta pupuknya. Pada awalnya pengembangan pertanian bermula dengan pengembangan tanaman kakao. Untuk mendukung program tersebut, kebun visitor plot kakao telah dikembangkan di dua kelompok tani yakni kelompok tani Mandiri Tepian Baru dan kelompok tani Km 86 Tepian Langsung. Pengembangan plot ini bekerja sama dengan Puslitkoka Jember. Namun karena penurunan harga yang signifikan, perkebunan kakao menurun secara drastis. Berikut disajikan tabel perkembangan kegiatan tanaman tahunan dalam rangka TJSL di PT KPC (Tabel 1.)

sejak tahun 2003 di Muara Bengalon. Karena berbagai kendala seperti gagal panen karena serangan virus, peralihan pekerjaan petambak, keterampilan teknis, dan kualitas air maka hasil yang didapatkan tidak maksimal. Di tengah kendala tersebut,

KPC memberikan bantuan alternatif lain yaitu benur bandeng kepada kelompok tani/ petambak yang masih aktif.

Selain pengembangan tambak, KPC juga memberikan perhatian kepada nelayan di Muara Bengalon karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dari hasil diskusi dengan enam kelompok nelayan serta pemerintahan desa, maka disepakati bahwa bantuan yang diperlukan adalah jala sebagai alat tangkap. Bantuan ini diperlukan karena sebagian besar nelayan masih kekurangan jala. Setelah bantuan tersebut digulirkan, hasil tangkapan berhasil meningkat sebanyak 40%. Selain bantuan tersebut, penguatan kelompok nelayan juga dilakukan melalui diskusi, pelatihan singkat, serta bantuan perlengkapan pendukung lainnya.

6. Pengembangan Perikanan Air Tawar

Program pengembangan perikanan air tawar di Bengalon telah dimulai sejak tahun 2007 yang merupakan hasil kerjasama antara KPC, Petugas Penyuluh Lapangan, dan kelompok tani setempat. Perikanan air tawar mempunyai daya tarik ekonomi tersendiri karena nilai ekonomi yang cukup tinggi serta perawatan yang sederhana. Sedangkan kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPC mengadakan beberapa kegiatan pelatihan dengan mendatangkan pelatih yang berpengalaman serta bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kutai Timur. Selain itu, PT KPC juga memberikan bantuan berupa bibit, pakan, alat kerja, serta penyelenggaraan studi lapangan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar di PT KPC (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan Kegiatan Budidaya Perikanan Air Tawar

No	Kegiatan	Waktu							Satuan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Luas lahan kolam	1	5	20	20	23	24	25	Hektar
2.	Jumlah kelompok tani	2	11	32	32	33	34	35	Hektar
3.	Jumlah anggota	20	110	340	360	360	360	370	Orang
4.	Jumlah desa yang terlibat	2	5	9	11	11	12	12	Desa

Sumber: PT. KPC (2014)

7.

Pengembangan Peternakan

Pengembangan peternakan yang dilakukan di tahun 2013 ini adalah ternak ayam kampung di Sepaso Barat. Hingga saat ini, KPC telah mendistribusikan 3.000 ekor anak ayam, pakan, serta alat pengendalian flu burung. Studi lapangan dan pelatihan pun juga telah dilaksanakan untuk peternak yang aktif.

Komunikasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Timur untuk pengembangan peternakan ayam kampung ini juga telah dilakukan. Hal ini berdampak sangat positif karena Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Timur berkomitmen untuk memberikan bantuan yang lebih besar seperti alat tetas dan induk ayam. Sepaso Barat diharapkan

menjadi pusat pengembangan ayam Nunukan (ayam asli Kalimantan) di Kutai Timur. Peternakan unggas ini sangat berdampak positif karena perputaran uangnya yang cukup besar dan cepat, serta penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Selain peternakan ayam, peternakan kambing juga dikembangkan di Bengalon selama tiga tahun terakhir ini. Jumlah kambing yang disebar ke petani pada akhir 2013 telah mencapai 97 ekor. Target program peternakan kambing adalah menjadikan Bengalon sebagai pusat penghasil kambing di Kutai Timur pada tahun 2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatihan budidaya kambing, monitoring dan evaluasi telah dilakukan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Timur.

8. Konservasi Tanaman Padi Lokal

KPC menaruh perhatian terhadap pengembangan padi gunung, mengingat bahwa ketahanan pangan di Kecamatan Bengalon sangat tergantung dari padi gunung. Selain itu, pengembangan padi gunung juga merupakan upaya konservasi padi gunung asli yang sudah dikenal oleh masyarakat. Di tahun 2013 ini, pelaksanaan konservasi yang dilakukan adalah distribusi benih padi gunung varietas lokal untuk lahan seluas 20 ha di daerah Segading Resettlement. Varietas yang dikembangkan adalah mayas, gedagai, serai, lahong, sesat jalan, mas, dan kunyit.

Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Pendampingan untuk pengembangan berbagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus dilakukan dalam rangka meningkatkan

daya saing produk lokal, baik di industri olahan pangan maupun non pangan. Pelaku usaha sebagian besar masih dalam taraf industri rumahan sehingga untuk melebarkan usaha dan meningkatkan jumlah transaksi masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Ketersediaan bahan baku, standarisasi produk, kemasan, pemasaran merupakan isu utama yang menjadi perhatian KPC dalam pedampingannya. Pada bulan Mei 2013, telah diresmikan OLSABARA untuk merespon sejumlah isu tersebut, terutama untuk lebih mendekatkan produk kepada konsumennya.

Selain industri rumahan, KPC juga memberikan perhatian dan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk ikut serta bekerjasama dalam rantai bisnisnya. Ketatnya persyaratan untuk bekerjasama dengan KPC merupakan wadah pembelajaran bagi kontraktor lokal untuk meningkatkan profesionalisme mereka, khususnya yang berkaitan dengan safety dan beberapa persyaratan lainnya.

Pelaporan dan serah terima laporan merupakan tahap terakhir skema TJSL KPC. Serah terima laporan senantiasa diikuti dengan penandatanganan berita acara di depan masyarakat. Publikasi acara serah terima ini dilakukan untuk memenuhi prinsip pengelolaan program TJSL yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan kedua prinsip tersebut akan membantu KPC dan pemerintah daerah dalam memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Bengalon sehingga pengelolaan program TJSL di masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dari uraian pada Sub-bab terdahulu ada beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Ketiga perusahaan yang diangkat sebagai kasus dan sekaligus lokasi

- studi pada dasarnya merupakan perusahaan skala besar, untuk sektor masing-masing, dan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat. Dipastikan bahwa ketiga perusahaan tersebut menyadari akan substansi Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yang memerintahkan pelaksanaan TJSL;
2. Akan tetapi dalam pengimplementasian TJSL terkesan berbeda, dimana PT. KPC (Pertambangan batu bara) terlihat memiliki program yang lebih terencana dan terstruktur. Sangat dimungkinkan hal tersebut dikarenakan TJSL adalah satu-satunya program pembinaan sosial yang dimiliki pada sektor pembangunan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) khususnya pada pasal 95 tertera secara jelas bahwa salah satu kewajiban perusahaan adalah untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ;
 3. Ada kemungkinan bahwa. PT SHJ (Hutan Tanaman Industri) dan PT.GS (Perkebunan kelapa sawit) lebih memfokuskan tanggung jawab sosialnya pada program yang telah dikembangkan oleh kementerian masing-masing. Kementerian Kehutanan (catatan: sekarang disebut sebagai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Permenhut No. 39 tahun 2013 yang telah menggariskan kewajiban bagi pemegang izin pemanfaatan hasil hutan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan kehutanan.

Sementara perusahaan perkebunan juga terlihat lebih mengutamakan pembangunan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dengan kata lain kebijakan di luar dari ketetapan di atas lebih dipertimbangkan sebagai 'donasi' semata;

4. Program-program TJSL yang dikembangkan oleh keseluruhan perusahaan yang diteliti tidak secara jelas menunjukkan proses yang ditempuh, apakah berbasis pada kebutuhan masyarakat yang perlu didengar aspirasinya dalam penyusunan rancangan TJSL ataupun merujuk pada program-program pembangunan pedesaan dari Pemerintah. Bahkan kerangka yang digariskan oleh GRI tidak juga ditampilkan sebagai referensi. Diduga bahwa hasil diagnosis dan disain perusahaan sendiri yang mendominir model TJSL yang dilaksanakan.

Berdasarkan catatan di atas dan guna mendapatkan respons dari pelaksana maupun pengguna dari TJSL tentang proses dan capaian dari program di ketiga implementasinya, maka dipertimbangan penting untuk melakukan review melalui observasi dan review lebih dalam.

3.4. Model Umum Pengembangan TJSL

Perumusan program kegiatan TJSL hanya bisa tepat jika dikembangkan pada proses yang tepat. Identifikasi atas program-program yang ada di berbagai perusahaan (termasuk pada kasus-kasus yang dipelajari) memberi kesan bahwa subyektifitas dari pihak perusahaan sangatlah besar. Tidak mengherankan jika dari analisis data hasil

wawancara parapihak menunjukkan situasi ketidak tahuan mereka atas program TJSL yang diselenggarakan oleh masing-masing perusahaan (Sub-Bab 4.3.).

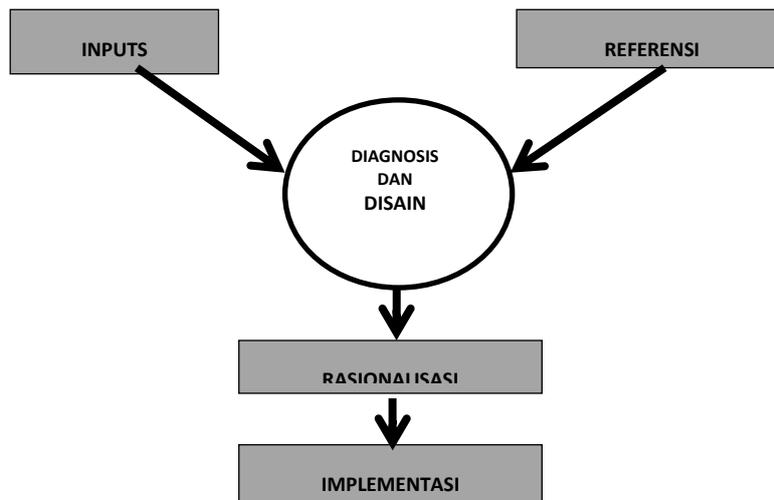
Proses penyusunan program menjadi fokus pembahasan dalam Sub-Bab ini dan hasil dari identifikasi program serta review implementasi TJSL dari ketiga perusahaan yang diteliti, menghasilkan berbagai elemen yang penting bagi penyusunan model umum pengembangan TJSL, yaitu:

- i. **Inputs**, adalah materi yang berasal dari isu yang berkembang secara internal atau eksternal di sasaran program (khususnya adalah masyarakat) yang coba ditangani melalui TJSL. Ada input yang harus dilakukan dengan upaya pencarian (a.l. analisis situasi dan identifikasi kebutuhan), tetapi juga ada yang telah tersedia dalam kerangka program kegiatan lain yang memungkinkan untuk diadopsi; yang dipertimbangkan. Inputs ini yang akan didiagnosis secara mendalam sebagai bagian dari pendisainan program;
- ii. **Diagnosis dan Disain**, adalah proses internal dalam perusahaan yang mencermati berbagai input yang masuk dan menjadi dasar untuk memolakan rancangan alternatif program yang perlu dilakukan dalam kerangka TJSL. Pada tahapan ini keseluruhan peluang program harus tetap dibuka sesuai dengan inputs yang diperoleh. Akan tetapi disain program juga harus mempertimbangkan/merujuk pada kisi-kisi teknis maupun legal yang tersedia/berlaku;
- iii. **Referensi**, adalah berbagai bentuk norma, standard, pedoman dan kriteria yang bisa digunakan untuk rujukan dan/atau kisi-kisi yang perlu

diperhatikan (dan bahkan diikuti) dalam rangka pengembangan program TJSL perusahaan, agar secara legal maupun teknis program kegiatan yang dikembangkan bisa berjalan lancar serta tidak menghadapi berbagai masalah ke depan. Indikator GRI adalah salah satu referensi, disamping untuk kasus Indonesia sangat penting memperhatikan peraturan kebijakan yang berlaku;

- iv. **Rasionalisasi**, adalah bagian penting dari proses pengembangan program guna memilih prioritas, baik karena pertimbangan obyektif maupun subyektif. Prioritasi adalah upaya untuk menyesuaikan antara keinginan/harapan dan kemampuan/kenyataan; Seperti diketahui dinamika sosial-ekonomi dan daya dukung lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam penetapan program TJSL. Demikian juga kapital atau modal yang dimiliki oleh pihak perusahaan;
- v. **Implementasi**, yaitu tahap pengekseskusan daripada program yang telah terasionalisasi, yang terdiri dari tahapan pengelolaan program dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya sendiri dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Implementasi program didasarkan pada rencana operasional (tahunan), akan tetapi operasionalisasi program TJSL dapat saja merujuk pada rencana jangka menengah (biasanya 5 tahun) dan jangka panjang (20-30 tahun)

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan terkait dengan kasus-kasus yang diteliti terdahulu, maka dapat diusulkan model umum yang bisa diikuti oleh perusahaan manapun (tidak dalam rangka pengembangan program TJSL sebagaimana disajikan pada Gambar berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Model Umum Pengembangan TJSL

Sebagai Model Umum tentu sangat terbuka bagi adanya improvisasi ataupun modifikasi yang dilakukan oleh penggunanya, dalam hal ini adalah operator TJSL. Demikian pula ada kemungkinan pendetilan daripada masing-masing elemen yang ditampilkan pada Gambar 69 di atas. Oleh karenanya dalam Sub-Bab selanjutnya akan disampaikan usulan model pengembangan program TJSL.

3.4.1. Usulan Model Pengembangan Program TJSL

Mempertimbangkan keseluruhan hasil penelitian serta merujuk pada Model Umum terdahulu maka dapat diusulkan 3 (tiga) model pengembangan TJSL yaitu: (1) Model TJSL berbasis input dari Bawah (*Bottom-Up Model*) ; (2) Model TJSL berbasis input dari Atas (*Top-Down Model*) ; serta Model Dua Arah (*Bilateral-Matching Model*). Ketiganya akan diuraikan masing-masing sebagai berikut:

Model TJSL Berbasis Input dari Bawah (bottom-up model)

Inputs

Model pengembangan TJSL melalui inputs dari masyarakat setempat (dan/atau karyawan perusahaan-jika TJSL dimaksud juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan karyawan), baik berupa permasalahan yang dihadapi dan/atau kebutuhan. Data dan informasi yang digunakan harus selengkap dan seakurat mungkin.

Menurut hasil pengamatan (lihat juga Sardjono, 1995), permasalahan yang terkait dengan kehidupan di pedesaan terutama yang terletak di sekitar hutan meliputi lima hal, yaitu: pangan, energi, bahan mentah, lingkungan dan sosial-ekonomi, Masuk dalam aspek sosial-ekonomi terakhir, tentu saja cukup luas, a.l. pendidikan, kesehatan dan pendapatan/mata pencaharian. Akan tetapi Sardjono (2015) menegaskan bahwa pada kondisi dewasa ini, uang tunai adalah inti daripada kesejahteraan, diikuti oleh kebutuhan mendasar (pangan, pendidikan dan kesehatan) serta bahkan kesejahteraan ditinjau pada ruang kebebasan untuk mengemukakan pendapat (demokratisasi).

Sementara didasarkan pada Teori Mazlow, Sardjono (2015) menampilkan tingkat kebutuhan manusia (meskipun terlihat sebagai individual) secara lebih

umum, yaitu : (1) Aktualisasi diri (*self actualization*); (2) Kepercayaan diri (*esteem*); (3) Dicintai/bagian dari kelompok (*love/belonging*); (4) rasa aman (*safety*); (5) Kejiwaan/ketenangan (*physiological*).

Apapun bentuk permasalahan/kebutuhan masyarakat haruslah dipertimbangkan sebagai input yang berharga untuk didiagnosis dan pengembangan disain.

Diagnosis dan Disain

Inputs ini selanjutnya akan didiagnosis (bisa saja didahului dengan pre-diagnosis) oleh pihak perusahaan sesuai dengan kategori yang telah dikemukakan. Dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan adalah permasalahan/kebutuhan tersebut harus diidentifikasi sifatnya, a.l. perorangan/kolektif; mendasar/tambahan; mendesak/tidak mendesak; jangka pendek/jangka panjang dan seterusnya.

Berbasis pada diagnosis maka dilakukan pendisainan program TJSL yang sifatnya masih berupa daftar panjang (*long-list*) dari program kegiatan apa yang harus dijalankan. Meskipun demikian dalam pendisainan harus diperhatikan berbagai kisi-kisi atau rujukan (secara keseluruhan disebut sebagai referensi) agar yang dikerjakan dalam TJSL tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga sesuai format atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Referensi

Referensi dalam rangka mendukung proses diagnosis dan disain program TJSL ada beberapa, akan tetapi sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan terdahulu dan dalam konteks sistem yang ada di Indonesia ada dua saja yang diusulkan. Pertama, adalah

referensi teknis dalam hal ini ada apa yang ditentukan oleh GRI seperti telah ditampilkan pada Sub-Bab terdahulu, dimana pada dasarnya program harus dapat diukur berdasarkan keseluruhan/sebagian indikator yang menguraikan tiga dampak: ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial.

Sedangkan referensi kedua, adalah kebijakan ataupun peraturan perundangan terkait yang diberlakukan di Indonesia, tidak terkecuali (dan bahkan sangat penting) adalah peraturan kebijakan sektoral (dalam hal ini adalah kehutanan, perkebunan dan pertambangan). Tanpa merujuk pada peraturan perundangan dan kebijakan, maka bisa saja menimbulkan persoalan administratif dan bahkan legal dalam penyelenggaraan program TJSL.

Rasionalisasi

Rasionalisasi sebagaimana telah disinggung terdahulu ada dua, pertama adalah kesesuaian dengan kondisi alam atau aspek biofisik wilayah, terutama jika kebutuhan masyarakat terkait dengan kegiatan berbasis lahan atau sumberdaya alam misal yang sifatnya agraris kegiatan pertanian, perkebunan dan sejenisnya. Seringkali pula bahwa dukungan yang diminta pada dasarnya tidak sesuai dengan kondisi wilayah, dikarenakan cukup banyak masyarakat, hanya dikarenakan keinginan meniru kesuksesan daripada desa/masyarakat tetangga.

Dalam hubungan dengan keinginan (*demands*), perlu dibedakan dengan kebutuhan (*needs*). Sardjono (2008) menggaris-bawahi, bahwa kebutuhan bersifat obyektif, terbatas, dan umumnya berkaitan dengan upaya mempertahankan hidup. Sedangkan keinginan bersifat subyektif, tidak terbatas, dan terkait prestis sosial.

Kesesuaian sosial-ekonomi juga penting, karena program apapun akan terkait dengan implikasi atau dampak yang dihasilkan. Pada wilayah yang sulit dengan kapital yang rendah misalnya, tidaklah mungkin menyelenggarakan program kegiatan yang harus mengucurkan subsidi terus-menerus, atau yang masyarakat tidak siap memperoleh dampaknya (*readiness*). Atau pada kultur masyarakat tebas-bakar (*slash and burn agriculture*), diperkenalkan teknis olah tanah melalui sarana produksi (saprodi), terlebih jika pra-kondisi tidak dipersiapkan. Dibeberapa tempat menyesuaikan dengan sosio-kultural kelompok sasaran TJSL juga sangat penting

Rasionalisasi lainnya adalah berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan sumberdaya (teknis maupun finansial) perusahaan, hal ini mengingat masukan dari masyarakat secara umum menjadi daftar panjang yang tidak mungkin dipenuhi keseluruhannya oleh pihak perusahaan. Dengan kata lain harus ada prioritas atau pemilihan kegiatan yang paling strategis dari sisi perusahaan. Menurut Sardjono (2011) ada beberapa kriteria yang dapat digunakan, a.l. ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan (dana, personal, dan sebagainya), jangka waktu proyek (dalam hal ini durasi TJSL), kelayakan politik, dampak soisal, keberlanjutan, dampak ekologis serta juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Implementasi

Setelah program kegiatan strategis ataupun prioritas ditetapkan, maka implementasi dilakukan. Berdasarkan model umum yang telah dikemukakan terdahulu, maka implementasi mencakup elemen atau unsur dari pengelolaan (manajemen) seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian

(*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian. (*controlling*).

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengelolaan partisipatif sangat dianjurkan, terlebih model TJSL dari bawah ini berbasis pada input dari kebutuhan masyarakat.. Partisipasi juga bagian penting dari elemen tatakelola pemerintahansuatu institusi (termasuk perusahaan) yang baik (*good corporate governance*). Bahkan Pemerintah juga telah mengembangkan pola perencanaan pembangunan desa secara partisipatif (P3MD) (Sardjono, dkk., 1998; 1999^b). Semakin luas dan semakin lengkap keterlibatan masyarakat, maka semakin mencerminkan keberdayaan atau kemadaniaan masyarakat (*civic society*). Oleh karenanya implementasi TJSL juga penting untuk memperhatikan hal ini, untuk keseluruhan tahapan pengelolaan, karena juga memungkinkan TJSLberadaptasi dengan dinamika yang mungkin terjadi.

Model TJSL Berbasis Input dari Atas (top-down model)

Inputs

Berbeda dengan TJSL yang berbasis inpiuts dari persoalan atau kebutuhan masyarakat lokal (*bottom-up model*) yang diuraikan terdahulu, maka untuk yang berbasis dari atas (*top-down model*) input diambil dari program-program pembangunan pedesaan pemerintah,(Pusat; Provinsi; Kabupaten/Kota), terutama di wilayah mana perusahaan beroperasi. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, baik yang bersifat regional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Tahunan) ataupun sektoral (Rencana Strategis/Kerja Sektor) akan sangat membantu pendisainan).

Hanya saja pelaksanaan program TJSL dengan proses seperti itu tidak akan

menjawab persoalan yang riil dihadapi masyarakat, meskipun asumsinya program-program pembangunan tersebut ditetapkan melalui proses musyawarah dari bawah, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes) hingga ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Perusahaan seperti hanya bersifat mendukung implementasi program Pemerintah, karena perusahaan berada lebih dekat dengan kelompok sasaran. Oleh karenanya dinamika dalam masyarakat tetap menjadi rujukan atau perhatian dalam tahapan berikutnya

Referensi

Pada dasarnya rujukan yang digunakan pada model dari atas tetap saja indikator yang diberikan oleh GRI dan peraturan perundangan atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai kisi-kisinya. Akan tetapi, khususnya terkait dengan peraturan kebijakan Pemerintah, hendaklah dicermati dengan baik, terutama pada era otonomi daerah (otda), seringkali dijumpai inkonsistensi antara apa yang diterbitkan oleh Pusat dan apa yang ingin dijalankan oleh Daerah. Demikian juga apa yang tertuang dalam perencanaan regional dan apa yang tercantum dalam kebijakan, mengingat perencanaan sektoral tetap mengakomodir berbagai program vertikal (dari kementerian terkait).

Diagnosis dan Disain

Proses diagnosis dan disain dalam model TJSL berbasis input dari atas yang diusulkan tidak berbeda dengan model terdahulu (*bottom-up model*). Bahkan proses ini bisa menjadi lebih sederhana dikarenakan identifikasi isu sudah dijalankan pada saat program pembangunan pedesaan resmi dilakukan dan disain program-program pembangunan pemerintah pada dasarnya bersifat standar.

Akan tetapi TJSL yang hanya menjalankan sebagaimana program pembangunan resmi, logikanya akan sulit mencakup keseluruhan dari isu yang berkembang di masyarakat, dikarenakan berbagai hal, antara lain dinamika yang cepat, serta preferensi dari sekelompok pihak yang mungkin tidak tertampung dalam program yang ditawarkan.

Rasionalisasi

Meskipun program-program pemerintah sudah melalui proses teknis maupun administratif yang cukup panjang dan detil, akan tetapi situasi dan kondisi lokal seringkali tidak terliput di dalamnya mengingat secara umum program dimaksud tidak diarahkan hanya untuk satu wilayah atau bahkan lokasi. Oleh karenanya rasionalisasi tetap harus dilakukan jika program TJSL tidak ingin mengalami kegagalan.

Kapasitas perusahaan memang harus menjadi bagian penting dari rasionalisasi. Dukungan perusahaan dalam implementasi program pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tidak berarti bahwa perusahaan mengambil alih keseluruhan tanggung jawab dari institusi berwenang. Oleh karenanya upaya menyelaraskan dengan bisnis utama (*core bussines*) perusahaan adalah salah satu hal penting dalam proses rasionalisasi.

Implementasi

Tahap implementasi pada model TJSL berbasis input dari atas ini juga tidak berbeda dengan model dari bawah. Hanya saja jika yang akan dilaksanakan adalah program-program Pemerintah, maka harus dipastikan apakah bersifat keseluruhan atau hanya bagian dari program, sehingga akan ada kepastian dari sisi anggaran dan juga keterselesaian daripada program itu sendiri.

Model TJSL Dua Arah (bilateral-matching model)

Usulan model pengembangan program kegiatan TJSL yang terakhir ini sebenarnya hanya merupakan kombinasi antara Model Pertama (*Bottom-Up Model*) dan Model Kedua (*Top-Down Model*), yang selanjutnya dinamakan sebagai Model Dua Arah (*Bilateral Matching Model*). Dengan pula tahapannya juga merupakan penggabungan antara keduanya. Hanya saja Model Ketiga ini membutuhkan kecermatan yang lebih tinggi, dan juga profesionalitas manajemen TJSL yang lebih dijamin. Hal ini dikarenakan perusahaan harus memiliki kapasitas dalam rangka memadukan dua isu yang berbeda, baik tujuan yang akan dicapai maupun proses yang harus dijalani. Mengkompromikan antara kebijakan dan kenyataan seringkali membawa pada situasi yang dilematis, akan tetapi secara keseluruhan akan mencakup aspirasi parapihak yang lebih luas.

Oleh karenanya jika memang dalam kenyataannya dalam suatu wilayah perusahaan tidak hanya sebagai ‘pemain tunggal’, membangun kerjasama atau kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tetangga dalam menjalankan program TJSL akan lebih membantu dalam penyelesaian persoalan di suatu wilayah. Di beberapa tempat proses kolaborasi semakin luas dijalankan.

4. KESIMPULAN

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh perusahaan besar berbasis lahan di Kalimantan Timur, khususnya tiga perusahaan yang menjadi kasus untuk diteliti, yaitu PT. Surya Hutani Jaya/PT. SHJ (Hutan Tanaman Industri); PT. Gunta

Samba/PT. GS (Perkebunan Kelapa Sawit); dan PT. Kaltim Prima Coal/PT. KPC (Pertambangan Batubara). Ketiga perusahaan tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan kriteria Global Initiative Report (GRI), yang memberikan aspek-aspek apa yang dapat menunjukkan keberhasilan Program TJSL dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada perusahaan Bidang Kehutanan (PT. SHJ) dan Bidang Perkebunan (PT. GS) pelaksanaan TJSL lebih banyak yang merupakan ‘donasi’ atau bantuan untuk suatu kebutuhan insidental atau periodik dan terkesan tidak terprogram secara sistematis/terarah. Kondisi tersebut dikarenakan secara sektoral Kehutanan dan Perkebunan telah memiliki program pemberdayaan masyarakat sendiri, yaitu Pola Kemitraan (Kehutanan) dan Kebun Plasma (Perkebunan). Sedangkan untuk PT KPC disimpulkan memiliki program TJSL yang lengkap dan konkrit.
- b. Keseluruhan para pihak, baik internal (staf perusahaan) dan eksternal (Pemerintah Daerah dan Masyarakat Lokal), secara umum memberikan penilaian atau persepsi positif (yang menyatakan perusahaan menjalankan TJSL) secara keseluruhan <50%. Sisanya menyatakan tidak menjalankan TJSL dan/atau tidak mengetahui adanya program tersebut, baik dari perspektif umum, perbaikan ekonomi, perlindungan lingkungan ataupun pembinaan sosial kemasyarakatan; Dari hasil analisis terhadap lingkup dan kualitas program TJSL yang

dijalankan oleh ketiga perusahaan, disimpulkan bahwa proses yang dijalankan dalam penyusunan dan implementasi program tidak berjalan optimal (kurang aspiratif dan/atau partisipatif).

2. Ditinjau dari uraian implementasi program TJSJL ketiga perusahaan, maka dapat diketahui tahapan yang harus dilalui dalam Pengembangan Program TJSJL. Berdasarkan hal ini dapat dikembangkan Model Umum Pengembangan Program TJSJL yang terdiri dari : Input; Diagnosis dan Disain; Referensi; Rasionalisasi dan Implementasi. Terdapat tiga kemungkinan pengembangan model yang dapat diadopsi berdasarkan pertimbangan masing-masing operator, yaitu:

- a) TJSJL yang didasarkan pada masukan atau input dari bawah (*bottom-up model*) yaitu hasil inventarisasi persoalan konkrit serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran;
- b) TJSJL yang didasarkan pada masukan atau input dari atas (*top-down model*) yaitu berbasiskan pada program-program pembangunan pedesaan yang telah dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah; serta
- c) TJSJL yang berdasarkan pada input dari bawah maupun dari atas atau dari dua arah (*bilateral matching*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ascher, W. 1999. Why Government Waste Natural Resources, Plocy Failures in Developing Countries. Baltimore/London: The John Hopkins University
- [2] Bappenas. 2003^a. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2002-2020*. Dokumen Nasional (National Document). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [3] Bappenas. 2003^b. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2002-2020*. Dokumen Regional (Regional Document). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [4] Boer, C.; M. A. Sardjono; Sutedjo; E. Erawan. 2004. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Alam. Kehutanan Kaltim pada Awal Era Otonomi Daerah*. Samarinda: Pemprov Kaltim dan Pusat Penelitian Hutan Tropis, Universitas Mulawarman
- [5] FWI/GFW.2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. (Portrait of Indonesian Forests). Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia and Washington, D. C.: Global Forest Watch.
- [6] Hamzah, H; Rosdiana. 2014. *Kajian Penataan Sistem Perizinan Bidang Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur*. Jakarta/Samarinda:

- UKP4/Center for Social Forestry/ The Asia Foundation (Laporan Penelitian - Tidak Dipublikasikan)
- [7] Justianto, A. 2005. Dampak Kebijakan Pembangunan Kehutanan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur: Suatu Pendekatan Model Neraca Sosial Ekonomi. Bogor : Institut Pertanian Bogor (IPB). (Disertasi Program Doktor – Tidak Dipublikasikan)
- [8] Marino, O.; H. Subagiyo; R. Alamanda. 2013. Masyarakat Sipil Mengawasi Alam. Review Izin Industri Berbasis Lahan. Jakarta: ICEL/TAF/UKaid
- [9] Newman, L. W., 2003, Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approach - 5thEd.USA Pearson Education Inc.
- [10] Noviatry,S. 2004 Bentuk Penerapan Tanggung Jawab Lingkungan, Studi Kasus Pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Kawasan Industri Jabotabek Cikarang. Jakarta.PSIL.
- [11] Polak, J. B.A. M. 1966. Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas Jakarta Balai Buku Balai Buku Ihtiar.
- [12] Richards, P. W. 1952. The Tropical Rain Forest. Cambridge: University Press.
- [13] Sardjono, M. A. 2008. Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan Sosial. Materi dipersiapkan untuk Kursus Penyusunan AMDAL, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman (PPLH Unmul), 01 Juli s/d 02 Agustus 2008
- [14] Sardjono, M. A. 2004^a. Mosaik Sosiologis Kehutanan. Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. Yogyakarta: Debut Press
- [15] Sardjono, M. A. 2004^b. Relevansi Prinsip Sosial dalam Sertifikasi Guna Mengoptimalkan Kesenambungan Sumberdaya Hutan dan Usaha Kehutanan. Materi disampaikan di Jakarta Oktober 2004. Samarinda: Fakultas Kehutanan Unmul/CSF
- [16] Sardjono, M. A. 2014. Dinamika Sektor Kehutanan di Kaltim: Tinjauan Periode 2009-2013 dan Perspektif ke Depan. Materi disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus “Kajian Peran Kehutanan dalam Pembangunan Regional dan Nasional”. Diselenggarakan oleh

- BAPPENAS di Samarinda,
09 September 2014.
- [17] Sardjono, M. A; S. Soedirman; S. Hardwinarto; F. Pambudhi; R. Diana; .W.W. Heranata; U. Rachmat; B. F. Fallah; Makinuddin; A. Wijaya; D. Momo; Rahmina; Hamzah; M. Fadli; Wahyuningtyas. 2012. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kaltim. Samarinda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
- [18] Soekanto, S. 1991. Sosiologi. Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- [19] Soemarwoto, O. 1985. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- [20] Soerjani, M; R. Ahmad dan R. Munir. 1987. Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [21] Soetrisno, L. 1993. Problematika Sosial Masyarakat Sekitar Hutan di Indonesia dan Etika Pemanfaatan Sumberdaya Hutan. Dalam Sumardi, A. Setyarso, Y. Suranto, H. Iswantoro (Eds.). 1993. Norma-Norma Kelestarian Sosial, Ekologi, dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada
- [22] Sumargo, W.; S. C. Nanggara; F. A. Nainggolan; I. Apriani. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009. Bogor: Forest Watch Indonesia
- [23] Whitmore, T.C. 1975. Tropical Rain Forest of the Far East. Oxford: Clarendon Press.
- [24] Wulan, Y.C.; Y. Yasmi; C. Purba; C. Purba; E. Wollenberg. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Bogor: Center for International Forestry Research.